BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu cita-cita Bangsa Indonesia adalah memiliki lembaga peradilan yang bersih, berwibawa, dan tidak memihak, sesuai dengan Cetak Biru Mahkamah Agung (Mahkamah Agung RI, 2010) Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah telah melakukan perbaikan terhadap citra lembaga peradilan melalui perbaikan sistem peradilan, mulai dari rekrutmen pejabat dan pegawai, promosi pejabat pimpinan, dan mutasi pejabat di lingkungan lembaga peradilan yang digarap secara serius. Namun komentar-komentar miring yang ditujukan kepada peradilan di Indonesia saat ini masih tersebar di masyarakat. Hal ini memberikan kondisi yang sangat rumit bagi upaya memperkuat integritas peradilan; Komentar-komentar miring terhadap lembaga peradilan, telah menjadi lembaga yang diyakini sangat korup (*Judicial Corruption*) dan sarat dengan praktik-praktik yang mencederai nilai-nilai keadilan, berdasarkan Penyusunan *Risk Register* Pembangunan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada Pengadilan Negeri Jambi (Penanganan Risiko Sistem Manajemen Anti Penyuapan, 2023).

Pengadilan Negeri Jambi yang berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Jambi merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum, dimana tugas pokok Pengadilan Negeri adalah

menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama(Pengadilan Tinggi Jambi, 2023)

Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Jambi telah berdiri pada masa peralihan dari pendudukan Jepang ke Negara Republik Indonesia pada tahun 1945, dengan terbentuknya Provinsi Jambi berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 yang pada waktu itu disebut Pengadilan Negeri Djambi, kemudian berganti nama menjadi Pengadilan Negeri Telanaipura pada tahun 1972 dan berubah kembali menjadi Pengadilan Negeri Jambi(Pengadilan Negeri Jambi, 2023).

Dalam proses penanganan perkara yang masuk, akan ditunjuk majelis hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut hingga proses berita acara melalui penetapan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, penunjukan Majelis Hakim untuk menangani suatu perkara masih sangat subjektif berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

Penetapan majelis hakim dilakukan secara berkala; penetapan ini dilaksanakan dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, atau dikuasakan kepada hakim senior sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan Pelaksana Harian Ketua Pengadilan Negeri. Rangkaian pengangkatan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi saat ini dinilai berdasarkan Pangkat/Golongan Hakim, Keahlian atau spesialisasi Hakim, dan Ratio Penyelesaian Perkara, dan Beban Perkara. Sistem yang berjalan saat ini masih menemukan kendala dalam proses implementasinya; kendala yang dialami adalah kurang optimalnya proses penetapan susunan majelis hakim

karena proses penetapan cenderung subjektif. Selain itu, Ketua Pengadilan Negeri juga harus menyesuaikan satu per satu data beban perkara dan ratio penyelesaian para hakim untuk menentukan komposisi majelis hakim. Hal ini berpotensi menghambat keberlangsungan penanganan suatu perkara karena tidak seimbangnya beban perkara majelis hakim dengan jumlah perkara di Pengadilan Negeri Jambi.

Faktor-faktor di atas mendorong munculnya gagasan untuk membuat Sistem Pendukung Keputusan Penetapan Susunan Majelis Hakim Perkara Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jambi, yang dapat membantu para pengambil keputusan dalam menentukan susunan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jambi. masa depan dengan memperhatikan indikator kepentingan setiap komponen yang ada sehingga dihasilkan pemeringkatan yang konsisten. Penulis menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process (AHP)* untuk mengimplementasikan sistem pendukung keputusan.

Analytical Hierarchy Process (AHP) dikembangkan awal tahun 1970-an oleh Dr. Thomas L. ,seorang ahli matematika dari Universitas Pittsburg. *Analytical Hierarchy Process (AHP)* pada dasarnya didesain untuk menangkap secara rasioanal persepsi orang yang berhubungan sangat erat dengan permasalahan tertentu melalui prosedur yang didesain untuk sampai pada suatu skala preferensi di antara berbagai set alternatif. Metode *Analytical Hierarchy Process (AHP)* adalah suatu metode pendukung keputusan untuk membuat urutan alternatif terbaik pada saat pengambilan keputusan dengan tujuan atau beberapa kriteria dalam pengambilan keputusan tertentu dengan penerapan

metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dalam sistem pendukung keputusan ini, dapat membantu melakukan pemilihan Susunan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jambi agar lebih independen, dan transparan.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis ingin melakukan penelitian untuk tugas akhir Metodologi Penelitian Sistem Informasi dengan judul, “ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN SUSUNAN MAJELIS HAKIM PERKARA TINGKAT PERTAMA MENGGUNAKAN METODE *ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP)* PADA PENGADILAN NEGERI JAMBI”.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang penulis angkat, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana menganalisis sistem pendukung keputusan penentuan susunan majelis hakim perkara tingkat pertama dengan metode *Analytical Hierarchy Process (AHP)* pada Pengadilan Negeri Jambi?
2. Bagaimana merancang sistem pendukung keputusan dalam proses penentuan susunan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jambi?

1.3 BATASAN MASALAH

Berdasarkan perumusan masalah diatas untuk memfokuskan penulisan dan memperjelas penyusunan agar lebih terarah, maka dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Sistem pendukung keputusan dibuat untuk menentukan susunan majelis hakim perkara tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jambi.
2. Data yang berkaitan dengan penelitian ini didapatkan berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan pengumpulan data berdasarkan analisa data perkara pada Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP Tahun 2023 dan data Hakim pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung Republik Indonesia data tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Jambi.
3. Kriteria yang digunakan dalam penelitian penentuan susunan majelis hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jambi adalah Pangkat/Golongan Ruang, Keahlian dari para Hakim, Ratio Penyelesaian Perkara, dan Beban perkara oleh masing-masing hakim yang terdapat di Pengadilan Negeri Jambi.
4. Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) digunakan untuk melakukan kalkulasi, sedangkan untuk metode pengembangan sistem menggunakan Sistem Pendukung Keputusan mulai dari tahap intelegensi hingga tahap implementasi.

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisa kebutuhan sistem pendukung keputusan susunan majelis hakim perkara tingkat pertama pada Pengadilan Negeri

Jambi dengan tetap memprioritaskan indikator skala prioritas dan kompetensi dari Hakim yang ada pada Pengadilan Negeri Jambi.

2. Merancang sistem penunjang keputusan penentuan susunan majelis hakim perkara tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jambi dengan Metode *Prototype*.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Pihak Akademis

Manfaat yang dapat diperoleh dalam hal ini pascasarjana Universitas Dinamika Bangsa Jambi adalah sebagai acuan pengembangan penelitian terkait sistem penunjang keputusan penentuan susunan majelis hakim

2. Pihak Institusi

- a. Dapat mewujudkan salah satu misi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam meningkatkan kredibilitas dan transparansi seluruh badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- b. Dapat memberikan kontribusi dalam bentuk inovasi bagi *stakeholder* dan instansi terkait sebagai sarana penunjang Layanan Keterbukaan Publik dalam mencapai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan mewujudkan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Badan Peradilan Umum serta mendukung program Badan

Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam mewujudkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, permasalahan yang dihadapi, batasan-batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, dan struktur penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, dijelaskan konsep teoritis terkait sistem informasi, analisis sistem, perancangan sistem, Algoritma *Analytical Hierarchy Process (AHP)*, serta tinjauan literatur yang mencakup hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas langkah-langkah metodologi penelitian, termasuk alur penelitian, bahan dan alat penelitian yang digunakan, serta jadwal penelitian yang diterapkan dalam proses penelitian.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, disajikan hasil penelitian yang mencakup gambaran objek penelitian, analisis sistem yang sedang berjalan, permasalahan yang diidentifikasi, solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut,

analisis kebutuhan sistem, serta rancangan sistem.

BAB V: PENUTUP

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, dilengkapi dengan saran-saran dari penulis yang dapat membantu penelitian selanjutnya.